

Mengukur Indeks Keislaman Ekonomi Negara ASEAN

Measuring the Islamic Economic Index of ASEAN Countries

Aam Slamet Rusydiana^{1*}, Mohammad B. Pamuncak²,

¹SMART Consulting, Indonesia

²Tazkia University, Indonesia

aamsmart@gmail.com

Naskah masuk: 16-10-2018

Naskah diterima: 25-10-2018

ABSTRAK

Ada banyak faktor dalam menentukan pertumbuhan ekonomi serta penjelasan dari kesuksesan kinerja ekonomi tidak hanya untuk mencakup kekuatan politik dan sosial. Secara khusus telah ada perhatian pada peran agama di bidang ekonomi, dengan adanya sejumlah ekonom yang mengeksplorasi hubungan antara agama dan kinerja ekonomi. Penulisan paper ini bertujuan untuk mengukur seberapa Islam Negara-negara yang mendeklarasikan sebagai Negara Islam, atau yang berpenduduk mayoritas Islam, atau yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang menjadi bagian dari ASEAN? Apakah Negara-negara tersebut menjalankan Prinsip-prinsip Keislaman dalam berekonomi? Untuk mengukur Keislaman ekonomi Negara-negara ASEAN, penulis menggunakan 10 indikator prinsip Keislaman berekonomi yang diwakilkan dengan 10 proksi yang berkaitan dengan Prinsip Keislaman dalam berekonomi tersebut.

Keywords: Indeks Keislaman Ekonomi, OKI, Negara-Negara ASEAN

ABSTRACT

There are many factors in determining economic growth and explanation of the success of economic performance not only to include political and social power. In particular there has been attention to the role of religion in the economic field, with a number of economists exploring the relationship between religion and economic performance. The writing of this paper aims to measure how Islam is the countries that declare an Islamic State, or who are predominantly Islamic, or who are members of the Organization of Islamic Confederation (OIC) which is part of ASEAN? Are these countries running Islamic Principles in economics? To measure the economic Islam of ASEAN countries, the author uses 10 indicators of economic Islamic principles represented by 10 proxies related to Islamic Principles in the economy.

Keywords: Economic Islamic Index, OIC, ASEAN Countries

Copyright © 2018 Program Studi Ekonomi Perbankan Islam, FAI Universitas Majalengka. All rights reserved.

I. PENDAHULUAN

Ada banyak faktor dalam menentukan pertumbuhan ekonomi serta penjelasan dari kesuksesan kinerja ekonomi tidak hanya untuk mencakup kekuatan politik dan sosial. Secara khusus telah ada perhatian pada peran agama di bidang ekonomi, dengan adanya sejumlah ekonom yang mengeksplorasi hubungan antara agama dan kinerja ekonomi.

Para pakar ekonomi telah sepakat, bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh beberapa

faktor sosial dan politik. Agama, adalah salah satu dari faktor sosial masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keputusan seseorang dalam kesehariannya termasuk keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan yang sebagiannya dipengaruhi oleh kepercayaan (agama) mereka. Penelitian Rusydiana (2009) mencoba melihat pengaruh perkembangan ekonomi dan keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Agama merupakan sistem sosial yang sudah terlembaga dalam setiap masyarakat. Secara

DOI:

mendasar agama menjadi norma yang mengikat dalam keseharian dan menjadi pedoman dari sebagian konsep ideal. Ajaran-ajaran agama yang telah dipahami dapat menjadi pendorong kehidupan individu sebagai acuan dalam berinteraksi kepada Tuhan, sesama manusia maupun alam sekitar. Ajaran itu bisa diterapkan dalam mendorong perilaku ekonomi, social dan budaya (Nasir, 1999: 45-47).

Teori Max Weber (1864-1924) dalam bukunya *Die Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* menjelaskan bahwa, pemikiran agama sangat berpengaruh bagi perkembangan aspek material (kehidupan di dunia ini), baik politik, ekonomi, social, maupun budaya. Atau dengan kata lain, ada hubungan yang sangat signifikan antara kemajuan dalam bidang pemikiran (immaterial) dan kemajuan dalam bidang material.

Jika agama dipandang sebagai variabel dependen, maka akan berarti bahwa tingkat perkembangan ekonomi misalnya standar hidup, atau campur tangan pemerintah dalam pasar, berdampak tingkat religiusitas misalnya kehadiran masjid atau ritual keagamaan lainnya. Namun, jika agama diperlakukan sebagai variabel independen maka tingkat religiusitas yang mempengaruhi ekonomi politik yaitu kinerja ekonomi, produktivitas, etos kerja, dan mengakibatkan perkembangan sosial.

Selain itu, untuk menyetarakan pandangan tentang tingkat keagamaan dengan berbedanya adat istiadat suatu negara. Tiap-tiap negara juga mempunyai agama dominan yang berbeda-beda. Apakah negara atau negara-negara yang mengaku bersangkutan mengikuti ajaran atau doktrin agama mereka, dan kemudian sampai sejauh mana. Dalam tulisan ini mengukur tingkat religiusitas negara-negara Islam di ASEAN.

Saat ini, banyak penelitian yang melakukan komparasi terkait kelebihan sistem ekonomi Islam dibanding dengan sistem ekonomi lain. Misal yang dilakukan oleh Nurfalah et.al (2018) dan Rani et.al (2017). Tulisan ini berusaha untuk membedakan apakah prinsip-prinsip ekonomi Islam yang kondusif untuk pasar bebas dan kinerja ekonomi yang kuat. Jika non-Islam kaya dan maju, negara-negara seperti Jerman dan Jepang berkinerja baik dibawah prinsip-prinsip yang dianut oleh Islam, maka bisa disimpulkan bahwa Islam bukanlah penghalang untuk kinerja ekonomi yang baik. Penulis melakukan hal ini untuk mengukur kepatuhan dari

10 negara ASEAN, Islam dan non-Islam ke dalam perilaku ekonomi Islam.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan cara pembobotan. Artinya, penulis mengambil proksi-proksi dalam sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi suatu Negara yang berkaitan dalam hal ini Negara-negara ASEAN, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip islam dalam berekonomi, kemudian mengurutkannya berdasarkan Poin yang diperoleh dari proksi-proksi kebijakan dan sistem ekonomi.

Hasil dari penelitian kali ini menunjukkan bahwa keislaman sistem ekonomi justru lebih banyak diterapkan oleh Negara-negara yang tidak mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam, atau negara yang mayoritas berpenduduk Islam, atau yang tergabung dalam Organisasi Konfederasi Islam (OKI). Akan tetapi yang notabene bukan negara dengan kriteria diatas menduduki peringkat pertama dalam menjalankan Keislaman dalam berekonomi. Artinya, agama bukan menjadi penghalang bagi suatu negara untuk berekonomi, justru agama menjadi pendorong untuk menciptakan kesejahteraan berekonomi bagi suatu negara. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penulisan ini, yaitu :

- Seberapa Islamkah negara Islam di ASEAN?
- Apakah Keislaman Ekonomi suatu Negara dapat dipastikan dengan jumlah penduduknya yang mayoritas beragama Islam, mendeklarasikan sebagai negara Islam, atau tergabung dalam Organisasi Konfederasi Islam (OKI)?
- Apa yang membuat keislaman dalam berekonomi menjadi rujukan utama dalam pertumbuhan ekonomi?

II. LANDASAN TEORI

Isu penggabungan prinsip-prinsip agama dalam berekonomi, bersosial, berpolitik dan berbudaya telah lama muncul dan menjadi pembahasan di kalangan para akademisi. Teori awalnya bermula ketika Max Weber, seorang sosiolog Asal Jerman mengemukakan pendapatnya tentang "rasionalisasi" kapitalisme. Hal tersebut memicu banya perdebatan di kalangan umat kristiani dan para akademisi tentunya. (Magnusson : 2002)

Weber beranggapan bahwa perilaku keseharian kehidupan seseorang, baik berekonomi, bersosial dan berpolitik dilandasi oleh pemahaman

DOI:

mereka tentang agama. Artinya, dalam sistem ekonomi yang pada saat itu banyak dipengaruhi oleh kapitalis, terdapat "rasionalisasi" dalam setiap sistem ekonomi kapitalis yang ada. Atau dengan kata lain, ada hubungan yang sangat signifikan antara kemajuan dalam bidang pemikiran (immaterial) dan kemajuan dalam bidang material. (Marx Weber : 1864-1924)

Lebih jauh dijelaskan, sebelum Weber mengungkapkan pendapatnya tentang kaitan antara agama dan ekonomi, Umat katolik di negara-negara eropa, yang pada zamannya memisahkan antara peribadatan dengan perilaku berekonomi. Sehingga, mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah daripada melakukan kegiatan ekonomi. Namun, yang terjadi kemudian adalah, golongan Protestan justru melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang telah dilakukan oleh golongan Katolik. Mereka berpendapat bahwa agama adalah salah satu pendorong dalam kehidupan berekonomi. Sehingga golongan Protestan lebih banyak menyimpan uang mereka dan berinvestasi atau melakukan kegiatan perekonomian. Hal tersebut yang menjadi dasar dari Teori Weber tentang "rasionalitas" dalam Kapitalisme. (Weber : 1930)

Selanjutnya, para ekonom berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu Negara dipengaruhi oleh banyak hal, sebagai contohnya adalah budaya yang berkembang di Negara tersebut. Hanya sedikit akademisi yang memperhatikan agama sebagai faktor determinan bagi pertumbuhan Ekonomi suatu Negara, kemudian Barro dan McCleary melakukan penelitian tentang pengaruh agama terhadap Negara dan kebijakan yang diambilnya, baik dalam ekonomi, pengambilan keputusan Politik dan tingkah laku masyarakatnya. (Barro & McCleary, 2003)

Hasil penelitian Barro & McCleary (2003) mengatakan bahwa tingkat kehadiran orang di gereja berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena bagaimanapun, kehadiran orang ke gereja menghambat produktivitas mereka, atau dalam artian output yang dihasilkan dari kehadiran mereka di gereja, dimana hal tersebut konstan, tidak sama dengan output yang dihasilkan ketika Recouces (orang-orang) tersebut bekerja. Dan karena bekerja, hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Negara tersebut.

Religiusitas dalam satu Negara atau tingkat ke religiusan suatu Negara adalah hal yang

kompleks dan kontroversial. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa dengan bertahan pada tingkat religiusitas, adalah sebuah alasan yang tidak dapat diterima, yang lain berpendapat bahwa apa yang dilakukan suatu Negara dalam mempertahankan Religiusitasnya merupakan suatu prinsip dari Negara tersebut, baik dalam pengambilan keputusan Politik ataupun ekonomi. Sehingga pembuatan Indeks keislaman ekonomi adalah untuk mengukur seberapa Islam ekonomi suatu Negara, baik yang mendeklarasikan sebagai Negara Islam, atau yang berpenduduk mayoritas Islam dan yang tergabung dalam Organisasi Konfederasi Islam, dan Negara yang tidak termasuk ke dalam semua criteria tersebut. (Rehman & Askari, 2010).

Namun bagaimanapun, Islam adalah agama yang sempurna (Quran 5 : 3). Sehingga semua hal yang bersifat sebagai pola hidup manusia, pengambilan keputusan dalam berpolitik dan ekonomi semuanya sudah terangkum dan teratur dalam ajaran agama Islam.

Ibnu Katsir dalam Tafsirnya Surat Al-baqoroh ayat 208 menjelaskan, mengenai firman Allah SWT 'udkhuluufissilmi', Al-'Aufi mengatakan bahwasannya maknanya adalah 'Islam' (Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Mujahid, Thawus, Adh-Dhahak, Qatadah, As-Suddi, dan Ibnu Zaid), sementara Adh-Dhahak mengatakan 'ia bermakna ketaatan' (Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Abul 'Aliyah, dan Rabi' bin Anas).

Mengenai firman-Nya 'kaafah', Ibnu 'Abbas, Mujahid, Abul 'Aliyah, 'Ikrimah, Rabi' bin Anas, As-Suddi, Muqatil bin Hayyan, Qatadah, dan Adh-Dhahak mengatakan 'maknanya berartijami'an (keseluruhan)', sementara Mujahid mengatakan, "Artinya, kerjakanlah semua amal shalih dan segala macam kebajikan." Oleh karena itu, makna keseluruhannya adalah bahwa mereka seluruhnya diperintahkan untuk mengerjakan semua cabang iman dan syari'at Islam, yang jumlahnya sangat banyak, sesuai dengan kemampuan mereka. (Hamdani, 2008)

Ekonomi sebagaimana yang dikembangkan dan dipraktekkan oleh Barat didasarkan pada pendekatan empirik yang mendesak ekonomi tersebut untuk hanya tergantung pada nilai-nilai yang bersifat positif dan mengabaikan nilai normatif. Padahal, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif diantara ilmu-ilmu social lainnya. Model dan teorinya akan selalu didasarkan pada sistem

DOI:

nilai tertentu, yaitu pada pandangan tentang hakikat manusia. Dengan demikian, ilmu ekonomi sudah seharusnya mengintegrasikan positivisme dan normativisme, antara pertimbangan rasional dan nilai atau moral. Studi di Desa Sukakarya membuktikan bahwa sistem perbankan, salah satu aspek sistem kapitalisme, dimana pragmatism dan rasionalisme menjadi motornya, belum membuat perilaku-perilaku social ekonomi (*social actions*) sebagian kaum Muslim di desa ini mengalami sekularisasi. Selain budaya perbankan yang belum tumbuh, tradisi keagamaan masyarakat lebih bersesuaian dengan sistem ekonomi yang bersifat mikro, karena lebih substantive dan membumi (*social embeddedness*). Sistem koperasi, misalnya, yang mengutamakan nilai-nilai humanis dan moral (*shared altruistic values*) lebih bisa diterima oleh masyarakat yang masih memegang solidaritas sosial yang bersifat mekanik. Selain itu, Islam yang menjadi pedoman hidup warga desa, telah memberikan jalan tengah yang adil. Terdapat keseimbangan yang adil untuk berbagai: Antara dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, idealism dan fakta, individu dan masyarakat, dan seterusnya. Sebagai tuntunan hidup, Islam diturunkan untuk menjawab berbagai persoalan dunia, baik dalam skala mikro maupun makro, termasuk persoalan kehidupan yang bernama ekonomi itu. (Balitbang, Diklat.Kemenag:2007)

Ada sebuah pertanyaan yaitu seberapa islamkah negara- negara islam? atau apa derajat keislaman perekonomian suatu negara? Sebelum kita mencoba untuk menjawab pertanyaan diatas, ada baiknya jika kita setuju pada Prinsip prinsip ekonomi dalam Islam yang berasal dari Alqur'an dan dipraktekkan langsung dengan ucapan maupun perbuatan oleh Nabi Muhammad saw. Perkembangan ekonomi dan pertumbuhannya sejalan dengan keadilan sosial dan ini merupakan elemen dasar dari sistem ekonomi Islam dan dewasa ini para pemerintah dan individu masyarakat wajib untuk menggunakan akal mereka untuk merumuskan dan menerapkan strategi untuk menghilangkan faktor penghambat kemajuan intelektual masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kebebasan sosial.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan kerangka nilai-nilai ke-Islaman terhadap aplikasi ekonomi dan keuangan atau penerapan *maqasid syariah*. Beberapa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rusydiana & Sanrego (2018), Rusydiana & Firmansyah (2017), Rusydiana & Alparisi (2016), serta Rusydiana (2013).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam merancang metodologi dari Indeks Keislaman Ekonomi, penulis menggunakan sepuluh dimensi (A-J) dari prinsip-prinsip ekonomi Islam dan selanjutnya penulis membaginya kedalam sub-kategori dan perwakilan yang spesifik yang pada akhirnya menggambarkan variabel-variabel Indeks Keislaman Ekonomi (lihat tabel I). Variabel-variabel yang penulis ambil pada dasarnya merupakan bagian dari Prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi, akan tetapi bukan menjadi jaminan bahwa tidak ada variabel-variabel lain yang dapat pula mewakili Prinsip-prinsip Keislaman dalam berekonomi. Dengan demikian, pada tahap ini penulis menggunakan perwakilan yang mencakup prinsip-prinsip ekonomi islam dengan sumber yang relevan, seperti Data Bank Dunia, Program Pengembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Kekayaan Budaya Dunia, Indeks Transparansi Korupsi.

Tabel 1: Sepuluh dimensi (AREA A-J) dan sub-kategori dari ilmu ekonomi Islam

| DIMENSI | KATEGORI EKONOMI ISLAM | SUB-KATEGORI |
|---------|--|---|
| AREA A | Peluang dan kebebasan dalam melakukan aktifitas perekonomian | Ketentraman melakukan aktifitas bisnis |
| AREA B | Keadilan dalam seluruh aspek menejemen perekonomian Ekonomi Islam : Hak milik properti dan kemurnian Kontrak | Kepemilikan dan perjanjian kontrak |
| AREA C | Perlakuan baik terhadap karyawan termasuk penciptaan lapangan kerja dan akses yang sama dalam mendapatkan pekerjaan | Kesempatan mendapat pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja yang sama |
| AREA D | Pengeluaran anggaran belanja yang relative tinggi untuk pendidikan terhadap GDP, termasuk akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan | Indikator Pengeluaran Umum Pendidikan |
| AREA E | Menghilangkan kemiskinan, memberikan bantuan, dan penyediaan kebutuhan dasar manusia, tidak menimbun kekayaan, kewajaran berekonomi | Ketentuan dari Indikator Kepedulian Kesehatan |

| | | |
|--------|--|---|
| | dan mengurangi kemewahan dalam berkonsumsi | |
| AREA F | Infrastruktur dan penyediaan jasa sosial yang lebih baik dari kewajiban membayar pajak untuk kesejahteraan sosial | Indikator Tingkat Perpajakan |
| AREA G | Tingginya angka dana simpanan dan investasi, Manajemen sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui | Indikator Dana Simpanan |
| AREA H | Tingginya standar moral, kejujuran, dan kepercayaan yang terdapat dalam pasar dan seluruh aspek interaksi perekonomian ditunjukkan dengan rendahnya tingkat korupsi | Indikator transparansi internasional |
| AREA I | Sistem keuangan islam : tidak adanya eksploitasi spekulasi dan penyebaran resiko untuk menghindari kewajiban membayar hutang_yakni system keuangan yang suportif | Investasi, Portofolio, Indikator Arus Modal |
| AREA J | Tingginya perdagangan / GDP, tingginya bantuan asing/GDP, dan tingginya persetujuan pemeliharaan lingkungan, kewaspadaan terhadap pengawasan pasar : keefektifan seluruh negara dalam meraih kemakmuran perekonomian | Indikator Kesejahteraan Umum |

Dari 10 proksi Index Keislaman Ekonomi yang penulis uji merupakan bentuk sederhana dari Prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan dengan Indikator, dan masing-masing indikator mempunyai sub kategori, kemudian masing-masing kategori mempunyai Proksi-proksi yang merupakan bentuk sederhana dari indikator keislaman ekonomi dan sub kategori. Proksi-proksi tersebut dapat dilihat dalam appendix 1

yang penulis susun untuk mengukur Keislaman ekonomi Negara-negara ASEAN.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Keislaman Ekonomi mengurutkan negara-negara islam yang dinyatakan berdasarkan kebijakan mereka, pencapaian atau prestasi dan realitas yang sesuai dengan serangkaian prinsip-prinsip ekonomi islam. Meskipun sulit dalam sebuah paper untuk mencakup secara detil esensi dari prinsip-orinsip ekonomi islam (prinsip-prinsip, pedoman, kebijakan, keadilan, dan lain-lain).Meskipun demikian, penulis menetapkan secara agregat 3 prinsip tujuan ajaran ekonomi untuk sebuah sistem ekonomi islam: (a) pencapaian keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (b) kemakmuran yang berbasis luas dan penciptaan lapangan kerja, (c) penerapan ekonomi islam dan praktek keuangan. (Rehman, Askari : 2010)

Pada saatnya kita memisahkan 3 ajaran pusat islam menjadi 10 area berdasarkan fundamental prinsip-prinsip ekonomi islam:1) Peluang dan kebebasan dalam melakukan aktifitas perekonomian; 2) Keadilan dalam seluruh aspek menejemen perekonomian Ekonomi Islam: Hak milik properti dan kemurnian Kontrak (Quran 2:188); 3) Perlakuan baik terhadap karyawan termasuk penciptaan lapangan kerja dan akses yang sama dalam mendapatkan pekerjaan; 4) Pengeluaran anggaran belanja yang relative tinggi untuk pendidikan terhadap GDP, termasuk akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan; 5) Menghilangkan kemiskinan, memberikan bantuan, dan penyediaan kebutuhan dasar manusia, tidak menimbun kekayaan, kewajaran berekonomi dan mengurangi kemewahan dalam berkonsumsi (Quran 89:15-18, 30:37-42, 34:34-36, 4:33, 3:180, 4:36-37, dan 92:5-11); 6)Infrastruktur dan penyediaan jasa sosial yang lebih baik dari kewajiban membayar pajak untuk kesejahteraan sosial; 7) Tingginya angka dana simpanan dan investasi, Manajemen sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui; 8) Tingginya standar moral, kejujuran, dan kepercayaan yang terdapat dalam pasar dan seluruh aspek interaksi perekonomian ditunjukkan dengan rendahnya tingkat korupsi (Quran 13:11 dan 17:16); 9) Sistem keuangan islam : tidak adanya eksploitasi spekulasi dan penyebaran resiko untuk menghindari kewajiban membayar hutang_yakni system keuangan yang suportif (Quran 2:275 dan 4:29); 10)Tingginya perdagangan

DOI:

/ GDP, tingginya bantuan asing/GDP, dan tingginya persetujuan pemeliharaan lingkungan, kewaspadaan terhadap pengawasan pasar : keefektifan seluruh negara dalam meraih kemakmuran perekonomian (yakni kemakmuran perekonomian untuk semuanya). Seharusnya ini menjadi catatan bahwa 10 prinsip-prinsip ekonomi islam diatas merupakan salah satu kemungkinan yang menggambarkan “Visi Ekonomi Islam.” (Rehman, Askari: 2010).

Pada paper ini penulis menilai dan mengurutkan negara negara ASEAN dalam 3 tambahan dimensi ekonomi: sistem hukum dan tata kelola, manusia dan hak-hak politik serta hubungan international. Penelitian terkait *islamic economic index* ini lebih komplit daripada penelitian sebelumnya tentang Agama dan ekonomi yang dalam hal ini Agama yang di gunakan mereka adalah agama kristen yang dilakukan oleh Barrow dan McCleary (Harvard: 2003). Karena islam adalah basis dari agama agama dan Alqur’an sebagai kitab suci jauh lebih explicit ketimbang bibel terutama tentang prinsip prinsip dan aturan.

Dari hasil estimasi pendekatan indikator, sub indikator dan proxy yang digunakan dalam metodologi penelitian diatas, dapat disimpulkan, diantara 10 negara – negara di ASEAN yang mengaplikasikan unsur-unsur berekonomi Islam dalam sistem perekonomian di negaranya adalah negara **Singapura**. Hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan poin tertinggi dibandingkan dengan negara yang lainnya. Adapun perolehan poin di masing-masing indikator dan peringkat dari 10 negara-negara ASEAN tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Indeks Keislaman Ekonomi Negara ASEAN

| No | Negara | Nilai pada masing-masing indikator | | | | | | | | | | Perolehan Nilai | Peringkat |
|----|-----------|------------------------------------|----|---|---|----|----|---|----|----|----|-----------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Singapura | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 82 | 1 |
| 2 | Malaysia | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 75 | 2 |
| 3 | Thailand | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 74 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|---|----|----|---|---|----|---|---|---|----|----|
| 4 | Vietnam | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 59 | 4 |
| 5 | Brunei Darussalam | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 10 | 8 | 5 | 9 | 54 | 5 |
| 6 | Laos | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 54 | 6 |
| 7 | Kamboja | 1 | 7 | 10 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 53 | 7 |
| 8 | Indonesia | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 49 | 8 |
| 9 | Filipina | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 48 | 9 |
| 10 | Myanmar | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 10 |

Hasil dari Indeks Keislaman Ekonomi di negara-negara ASEAN dapat dilihat pada tabel 2 di atas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN yang mendeklarasikan sebagai negara Islam, atau berpenduduk mayoritas Islam, atau tergabung dalam Organisasi Konfederasi Islam tidak dalam peringkat Pertama dalam pengurutan Indeks Keislaman Ekonomi suatu negara. Dari 10 indikator yang diujikan, dengan 10 proksi perwakilan dari masing-masing indikator, dapat diketahui bahwa negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, serta Indonesia yang mewakili negara islam tidak mampu menunjukkan Keislaman Ekonomi mereka, terbukti mereka hanya berada di peringkat 2, 5 dan 8 dari 10 negara-negara ASEAN, sesuai dengan yang penulis uji.

Secara global tujuan islam untuk mensejahterakan seluruh umat manusia dan keadilan sosial yang berarti seluruh manusia berhak untuk mendapatkan dan menerima kesempatan untuk mengasah diri, dengan kata lain semua berhak untuk mendapatkan akses atas sumber daya yang diberikan oleh Allah swt. Bagi mereka yang tidak punya pekerjaan dan mungkin tidak dapat berkerja seperti yang lain maka masyarakat disekitarnya harus mengumpulkan uang dan memberikan kepada orang yang tidak bisa bekerja itu agar ia bisa hidup dengan cukup bermartabat, makanan, kesehatan, tempat tinggal dan hak hak masa depan. Jadi Islam menganjurkan sebuah lingkungan dimana perilaku yang dibentuk itu untuk mendukung tujuan ekonomi islam ; kesejahteraan sosial dan keadilan sosial ekonomi.

V. KESIMPULAN

Ada banyak faktor dalam menentukan pertumbuhan ekonomi serta penjelasan dari kesuksesan kinerja ekonomi tidak hanya untuk mencakup kekuatan politik dan sosial. Secara khusus telah ada perhatian pada peran agama di bidang ekonomi, dengan adanya sejumlah ekonom yang mengeksplorasi hubungan antara agama dan kinerja ekonomi. Banyak penelitian yang mendikotomikan antara ajaran agama dan pengambilan keputusan kehidupan manusia. Ada juga yang menyatakan bahwa pengaruh agama dalam kehidupan berekonomi berdampak negatif seperti yang dikemukakan oleh Barro dan McCleary (Harvard 2003). Akan tetapi sesungguhnya, agama Islam ajaran agama dan kehidupan berekonomi tidak bisa dipisahkan, karena apa yang telah diatur dalam Islam sesungguhnya bertujuan untuk kemaslahatan bagi yang menjalankannya.

Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa Agama bukan menjadi penghalang bagi suatu Negara untuk mencapai kesejahteraan, akan tetapi menjadi motor penggerak perekonomian Negara tersebut. Terbukti, Singapura sebagai Negara yang notabene bukan termasuk Negara yang memenuhi indikator Negara Islam atau Negara yang berpenduduk mayoritas Islam, dan bukan bagian dari Organisasi Konfederasi Islam menduduki peringkat pertama sebagai negara yang menerapkan Prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi. Dan dewasa ini dapat dilihat dari negara-negara anggota ASEAN, Singapura dianggap sebagai Negara paling Maju. Hal yang berbeda terjadi pada negara-negara anggota ASEAN yang lain yang memenuhi criteria sebagai negara yang mendeklarasikan sebagai negara Islam, atau yang berpenduduk mayoritas Islam atau anggota Organisasi Konfederasi Islam, negara-negara seperti Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia terbukti tidak menerapkan Prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi, dan dibandingkan dengan Singapura, mereka tidak lebih baik dalam hal berekonomi.

Indeks Keislaman Ekonomi yang diwakilkan oleh 10 proksi yang penulis uji merupakan sebagian Perwakilan dari Prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi, tapi perlu dicatat bahwa hal tersebut bukan satu-satunya faktor determinan bagi pengambilan keputusan berekonomi, atau kemajuan ekonomi suatu negara, masih banyak faktor determinan yang lain yang tidak penulis masukan dalam penelitian kali ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Barro, J Robert and McCleary, M Rachel. 2003. *Religion and Economic Growth* : Harvard University
- Hamdani, Dani. 2008. *Makna 'Kafaah' dalam surat Albaqarah* : 208
- Magnusson, Magnus Arni. 2002. *The Economic Consequences of Religion : Marx Weber "Spirit of Capitalism" revisited* : Briforst School of Business
- Nasir, Nanat Fatah. 1999. *Etos Kerja Wirausahawan Muslim*. cet. I Bandung: Gunung Jati Press.
- Nurfalah, I., Rusydiana, A.S., Laila, N., and Cahyono, E.F. 2018, "Early warning to banking crises in the dual financial system in Indonesia: The markov switching approach", *JKAU: Islamic Economics*, Vol.31, No.2, pp.133-156.
- Rani, L., Rusydiana, A., and Widiastuti, T. 2017. "Comparative analysis of Islamic bank's productivity and conventional bank's in Indonesia period 2008-2016". In *1st International Conference on Islamic Economics, Business and Philanthropy (ICIEBP 2017)*, pp. 118-123.
- Rehman, S Scheherazade and Askari, Hossein. 2010. *An Economy Islamicity Index (EI²)* : George Washington University
- Rusydiana, Aam S., and Yulizar D. Sanrego, 2018. "Mesuring the performance of Islamic banking in Indonesia: An application of Masalah efficiency quadrant (MEQ)". *Journal of Monetary Economics and Finance*, Vol 3 Special Issue, pp.103-130.
- Rusydiana, Aam S, and Irman Firmansyah, 2017. "Efficiency versus Maqasid sharia index: An application on Indonesia Islamic bank". *Shirkah Journal of Economics and Business*, Vol 2 No 2.
- Rusydiana, Aam S, and Salman Al Parisi, 2016. "The measurement of Islamic bank performance: A study using maqasid index and profitability". *Global Review of Islamic Economics and Business*, Vol. 4, No. 1, pp.1-14.
- Rusydiana, Aam S., 2013. "Maqasid syariah index sebagai ukuran kinerja perbankan". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1.
- Rusydiana, Aam S, 2009. "Hubungan antara perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia", *Tazkia*

APPENDIX 1:

RINGKASAN DARI KATEGORI-KATEGORI ILMU EKONOMI ISLAM, SUB KATEGORI DAN VARIABEL-VARIABEL PROKSINYA

| Dimensi | PRINSIP-PRINSIP EKONOMI | SUB-KATEGORI | PERWAKILAN |
|---------|--|--|--|
| A | PELUANG DAN KEBEBASAN DALAM MELAKUKAN AKTIFITAS PEREKONOMIAN | <i>Ketentraman Melakukan Aktifitas Bisnis</i> | Perwakilan 1: Peringkat Bank DuniadalamKemudahanMenjalankanBisnisdenganLisensi |
| B | KEADILAN DALAM SELURUH ASPEK MENEJEMEN PEREKONOMIAN EKONOMI ISLAM : HAK MILIK PROPERTI DAN KEMURNIAN KONTRAK | <i>Kepemilikan dan Perjanjian Kontrak</i> | Perwakilan 2:Peringkat The Heritage Foundation of Econonic Freedom dalamHakMilikKepemilikan |
| C | PERLAKUAN BAIK TERHADAP KARYAWAN TERMASUK PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN AKSES YANG SAMA DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN | <i>Kesempatan Mendapat Pekerjaan dan Penciptaan Lapangan Kerja yang Sama</i> | Perwakilan 3: Peringkat Bank DuniaIndikatorJumlahPekerjaWanita (% dari Total Pekerja) |
| D | PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA YANG RELATIVE TINGGI UNTUK PENDIDIKAN TERHADAP GDP, TERMASUK AKSES YANG SAMA UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN | <i>Indikator Pengeluaran Umum Pendidikan</i> | Perwakilan 4: Peringkat PBB dalam HDI ; Pengeluaran Negara UntukPendidikan (% GDP) |
| E | MENGHILANGKAN KEMISKINAN, MEMBERIKAN BANTUAN, DAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA, TIDAK MENIMBUN KEKAYAAN, KEWAJARAN BEREKONOMI DAN MENGURANGI KEMEWAHAN DALAM BERKONSUMSI | <i>Ketentuan dari Indikator Kepedulian Kesehatan</i> | Perwakilan 5: Peringkat PBB dalam HDI ; Pengeluaran Negara UntukKesehatan (% GDP) |
| F | INFRASTRUKTUR DAN PENYEDIAAN JASA SOSIAL YANG LEBIH BAIK DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL | <i>Indikator Tingkat Perpajakan</i> | Perwakilan 6: Peringkat Bank Dunia ; IndikatorPendapatanPajak (% GDP) |
| G | TINGGINYA ANGKA DANA SIMPANAN DAN INVESTASI, MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM YANG TIDAK DAPAT DIPERBAHARUI | <i>Indikator Dana Simpanan</i> | Perwakilan 7: Peringkat Bank Dunia ; IndikatorJumlah Tabungan : Jumlah Tabungan Nasional (% GNI) |
| H | TINGGINYA STANDAR MORAL, KEJUJURAN, DAN KEPERCAYAAN YANG TERDAPAT DALAM PASAR DAN SELURUH ASPEK INTERAKSI PEREKONOMIAN DITUNJUKAN DENGAN RENDAHNYA TINGKAT KORUPSI | <i>Indikator Transparansi Internasional</i> | Perwakilan 8: TransparansiInternasional dalamIndeksPeresepsiKorupsi (CPI) |
| I | SISTEM KEUANGAN ISLAM : TIDAK ADANYA EKSPLOITASI SPEKULASI DAN PENYEBARAN RESIKO UNTUK MENGHINDARI KEWAJIBAN | <i>Investasi, Portofolio, Indikator Arus Modal</i> | Perwakilan 9: Peringkat Bank DuniadalamInvestasiAsings |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
| | MEMBAYAR HUTANG, YAKNI SISTEM KEUANGAN YANG SUPORTIF | | ecaraLangsung, Net Inflows (% GDP) |
| J | TINGGINYA PERDAGANGAN / GDP, TINGGINYA BANTUAN ASING/GDP, DAN TINGGINYA PERSETUJUAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN, KEWASPADAAN TERHADAP PENGAWASAN PASAR : KEEFEKTIFAN SELURUH NEGARA DALAM MERAHAI KEMAKMURAN PEREKONOMIAN | <i>Indikator Kesejahteraan Umum</i> | Perwakilan 10: Peringkat Bank Dunia ; Indikator Pertumbuhan GDP Per Tahun (%) dari tahun 1994-2005 (PPP) dan GDP Per Capita PPP (Dalam Dolar) |

APPENDIX 2:**Cara Pengukuran Indeks Keislaman Ekonomi Negara-Negara ASEAN :****METODOLOGI**

Bagian ini membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam menilai seberapa “*Ekonomi Islam*” 10 negara-negara di ASEAN melalui pendekatan beberapa indikator, dimana masing-masing indikator dibagi ke dalam sub kategori yang masing-masing kategorinya memiliki proxy. Semua indikator yang digunakan merujuk kepada nilai – nilai dan hakikat yang terkandung dalam *Maqashid Shariah* (maksud dan tujuan Shariah)

Berikut hasil estimasi penilaiannya :

1. Indikator :**ECONOMIC OPPORTUNITY AND ECONOMIC FREEDOM**

(Peluang dan kebebasan dalam melakukan aktifitas perekonomian)

Sub Kategori :**Ease of Doing Business**

(Ketentrangan melakukan aktifitas bisnis)

Proxy :**World Bank Ease Of Doing Business Ranking Of Dealing With Licenses****2. Indikator :****JUSTICE IN ALL ASPECTS OF ECONOMIC MANAGEMENT I.E. PROPERTY RIGHTS AND THE SANCTITY OF CONTRACTS**

(Keadilan dalam seluruh aspek manajemen perekonomian Ekonomi Islam : Hak milik properti dan kemurnian Kontrak)

Sub Kategori :**Property and Contract Rights**

(Kepemilikan dan perjanjian kontrak)

Proxy :**The Heritage Foundation Index Of Economic Freedom Of Property Rights****3. Indikator :****BETTER TREATMENT OF WORKERS INCLUDING JOB CREATION AND EQUAL ACCESS TO EMPLOYMENT**

(Perlakuan baik terhadap karyawan termasuk penciptaan lapangan kerja dan akses yang sama dalam mendapatkan pekerjaan)

Sub Kategori :**EQUAL EMPLOYMENT AND JOB CREATION**

(Kesempatan mendapat pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja yang sama)

Proxy :**World Bank Development Indicators Of Labor Force, Female (% Of Total Labor Force)****4. Indikator :****HIGHER EDUCATION EXPENDITURES RELATIVE TO GDP INCLUDING EQUAL ACCESS TO EDUCATION**

(Pengeluaran anggaran belanja yang relative tinggi untuk pendidikan terhadap GDP, termasuk akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan)

Sub Kategori :**Education Public Expenditures Indicator**

(Indikator Pengeluaran Umum Pendidikan)

Proxy :**United Nations Human Development Index Of Public Expenditure On Education (% Of GDP)****5. Indikator :****POVERTY ERADICATION, AID, AND PROVIDING BASIC HUMAN NEEDS, NO HOARDING OF WEALTH I.E. ECONOMIC EQUITY, AND LESS OPULENCE IN CONSUMPTION**

(Menghilangkan kemiskinan, memberikan bantuan, dan penyediaan kebutuhan dasar

DOI:

manusia, tidak menimbun kekayaan_kewajaran berekonomi dan mengurangi kemewahan dalam berkonsumsi)

Sub Kategori :**Provision of Healthcare Indicators**

(Ketentuan dari Indikator Kepedulian Kesehatan)

Proxy :

United Nations Human Development Index Of Public Expenditure On Health (% Of GDP)

6. Indikator :**BETTER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND PROVISION OF SOCIAL SERVICES THROUGH TAXATION AND SOCIAL WELFARE**

(Infrastruktur dan penyediaan jasa sosial yang lebih baik dari kewajiban membayar pajak untuk kesejahteraan sosial)

Sub Kategori :**Taxation Level Indicator**

(Indikator Tingkat Perpajakan)

Proxy :

World Bank Development Indicators Of Tax Revenue (% Of GDP)

7. Indikator :**HIGHER SAVINGS AND INVESTMENT RATES I.E. MANAGEMENT OF NATURAL AND DEPLETABLE RESOURCES**

(Tingginya angka dana simpanan dan investasi _ Manajemen sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui)

Sub Kategori :**Savings Indicator**

(Indikator dana simpanan)

Proxy :

World Bank Development Indicators Of Adjusted Savings: Net National Savings (% Of GNI)

8. Indikator :**HIGHER MORAL STANDARD, HONESTY AND TRUST EXHIBITED IN THE MARKETPLACE AND IN ALL ECONOMIC INTERACTIONS I.E. LESS CORRUPTION**

(Tingginya standard moral, kejujuran, dan kepercayaan yang terdapat dalam pasar dan

seluruh aspek interaksi perekonomian_ditunjukkan dengan rendahnya tingkat korupsi)

Sub Kategori :**Transparency International Indicator**

(Indikator transparansi internasional)

Proxy :

Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI)

9. Indikator :**ISLAMIC FINANCIAL SYSTEM I: NO EXPLOITIVE SPECULATION AND RISK SHARING AS OPPOSED TO DEBT CONTRACTS I.E. A SUPPORTIVE FINANCIAL SYSTEM**

(Sistem keuangan islam : tidak adanya eksploitasi spekulasi dan penyebaran resiko untuk menghindari kewajiban membayar hutang_yakni system keuangan yang suportif)

Sub Kategori :**Investment, Portfolio, & Capital Flows Indicator**

(Investasi, Portofolio, Indikator Arus Modal)

Proxy :

World Bank Development Indicators Of Foreign Direct Investment, Net Inflows (% Of GDP)

10. Indikator :**HIGHER TRADE/GDP, HIGHER FOREIGN AID/GDP AND HIGHER DEGREE OF ENVIRONMENTAL PRESERVATION AND VIGILANTLY SUPERVISED MARKETS I.E. OVERALL STATE EFFECTIVENESS IN ACHIEVING ECONOMIC PROSPERITY GENERAL ECONOMIC PROSPERITY**

(Tingginya perdagangan / GDP, tingginya bantuan asing/GDP, dan tingginya persetujuan pemeliharaan lingkungan,kewaspadaan terhadap pengawasan pasar : keefektifan seluruh negara dalam meraih kemakmuran perekonomian)

Sub Kategori :**General Prosperity Indicator**

(Indikator kesejahteraan untuk semua)

E-ISSN: 2621-5012

Available

Online

at

<http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>

DOI:

Proxy :

World Bank Development Indicators Of GDP
(PPP) Growth (Annual %) From 1994-2005 &
GDP Per Capita PPP (In \$)